



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)  
DINSOSPMD KAB. PANGANDARAN**



**TAHUN 2021**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena limpahan rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran merupakan Laporan Tahunan yang dapat memberikan gambaran capaian program tahun 2021, Rencana Kinerja tahun 2021 dan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran, sekaligus dijadikan dasar/ pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi optimalisasi kinerja pembangunan di Bidang Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran yang transparan dan memenuhi unsur akuntabilitas sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan ikut menyempurnakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) ini. Akhirnya kami berharap mudah-mudahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat dipergunakan sebagai informasi kegiatan dan evaluasi pembangunan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Pangandaran.

Parigi, 24 Januari 2022

KEPALA,  
DINSOSPMD KAB. PANGANDARAN

**H. WAWAN KUSTAMAN, S.Pd., MM.**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670722 199307 1 001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini disusun. LKjIP ini menyajikan capaian Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama tahun 2020 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres No.7 Tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LKjIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. LKjIP Tahun 2021 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2021 Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran melaporkan capaian kinerja (*Performance result*) selama tahun 2021 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pangandaran.

## DAFTAR TABEL

	<i>Hal</i>
Tabel 1.1 Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah .....	3
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran.....	9
Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	9
Tabel 2.3 Kebijakan dan Program .....	10
Tabel 2.4 Target Kinerja Sasaran.....	11
Tabel 2.5 Target Kinerja Program .....	15
Tabel 2.6 Target Kinerja Kegiatan Tahun 2021 .....	16
Tabel 2.7 Laporan Anggaran Per Sasaran Tahun 2021 .....	23
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kerja .....	25
Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja SKPD Per Sasaran .....	25
Tabel 3.3 Pengukuran Capaian Kinerja SKPD Per Program dan Kegiatan.....	27
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya .....	34
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2021 dengan target jangka menengah .....	55
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2021 dengan standar nasional	57
Tabel 3.7 Analisis Penyebab penurunan kinerja dan solusi yang di lakukan .....	57
Tabel 3.8 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .....	58
Tabel 3.9 Analisa Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja .....	58
Tabel 3.10 Analisis Realisasi Program .....	60

## DAFTAR ISI

	<i>Hal</i>
KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1. LATAR BELAKANG .....	1
2. SASARAN KINERJA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA .....	2
3. ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA .....	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	8
1. PERENCANAAN .....	8
2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 .....	9
3. LAPORAN ANGGARAN PERSASARAN .....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	24
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	24
B. REALISASI ANGGARAN .....	47
BAB IV PENUTUP .....	60
DAFTAR LAMPIRAN.....	61

## DAFTAR GAMBAR

	<i>Hal</i>
Gambar 2.1 .....	i

## DAFTAR TABEL

	<i>Hal</i>
Gambar 2.1 .....	i

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pelaporan kinerja merupakan salah satu tahapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan menjadi bagian yang penting dalam proses pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Hal tersebut berdasarkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang telah diterbitkan pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana selanjutnya diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pelaporan kinerja adalah tahap ke-5 dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden yang berlaku. Peraturan Presiden ini secara tegas menyatakan tentang sistem akuntabilitas kinerja yang mencakup tahapan siklus, yaitu: 1) Rencana Strategis, 2) Perjanjian 18 Kinerja, 3) Pengukuran Kinerja, 4) Pengelolaan Data Kinerja, 5) Pelaporan Kinerja, 6) Reviu dan Evaluasi Kinerja. Maka, setiap instansi dan unit kerja pemerintah dan pemerintah daerah wajib menerapkan siklus tersebut sebagai bagian dari pemenuhan akuntabilitas kinerja.

Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan, dan diinstruksikan kepada setiap kepala daerah agar melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Mekanisme dan tahapan teknis, substantif, dan koordinasi teknis seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan pelaporan kinerja, secara tegas telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan Pemerintah Daerah. Laporan ini berisi mengenai pertanggungjawaban kinerja dalam mewujudkan sasaran strategis pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (RPJMD) dan Perjanjian Kinerja dengan fokus pada pertanggungjawaban capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. 19 Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, Laporan Kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

## **1.2 Sasaran Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

### **a. Visi**

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna merumuskan rencana pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada.

Visi merupakan kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus memberikan arah pembangunan atau *clarity of direction*. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan /atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Maka Visi Jangka Menengah (Tahun 2021-2026) Kabupaten Pangandaran adalah:

**“PANGANDARAN JUARA MENUJU WISATA BERKELAS DUNIA YANG BERPIJAK PADA NILAI KARAKTER BANGSA”**

**B. MISI**

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran arah menuju visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah serta faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Dengan gambaran misi yang demikian, tim menelaah misi kepala daerah dan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan, lalu menerjemahkannya ke dalam pernyataan misi sesuai kriteria pernyataan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

**Tabel 1.1**  
**Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah**

<b>Visi</b>	<b>Misi</b>
<b>PANGANDARAN JUARA MENUJU WISATA BERKELAS DUNIA YANG BERPIJAK PADA NILAI KARAKTER BANGSA</b>	1. Misi 1 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama
	2. Misi 2 Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan
	3. Misi 3 Mengembangkan Aksesibilitas Kesehatan dan Pendidikan Sampai Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peningkatan Kompetensi Lulusan

Visi	Misi
	4. Misi 4 Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal
	5. Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel
	6. Misi 6: Meningkatkan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan

### c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah, berikut disajikan tujuan dan sasaran Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026:

1. Memperkuat Nilai-Nilai Karakter Bangsa Berbasis Nilai Luhur dan Budaya Lokal.
2. Terwujudnya Pengelolaan Pariwisata yang Efektif dan Efisien yang Menjunjung Nilai-Nilai Kearifan Lokal
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkarakter dan Berdaya Saing.
4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Untuk Menjamin Kesejahteraan Masyarakat.
5. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah yang Mampu

Memberikan Pelayanan Publik yang Prima.

6. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Layanan Infrastrukturyang tangguh bencana

Sementara itu, sasaran merupakan rumusan kondisi yang mengartikulasikan tujuan serta menggambarkan tahap untuk mencapai sebuah tujuan. Sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Merujuk pada rumusan tujuan di atas maka berikut disajikan hasil rumusan sasaran Kabupaten Pangandaran tahun 2021- 2026:

1. Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat dalam rangka menjamin toleransi dan kerukunan umat beragama
2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
3. Peningkatan Akses Dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
4. Meningkatkan Aksesibilitas Dan Kualitas Layanan Kependidikan Dan Kesehatan Secara Komprehensif
5. Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi di tingkat nasional dan internasional
6. Melambatnya Laju Pertumbuhan Penduduk
7. Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan
8. Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
9. Meningkatnya Permukiman Layak Huni
10. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Tenaga Kerja
11. Meningkatkan Cakupan Penanganan PPKS
12. Meningkatkan Kualitas Dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)
13. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Cepat Dan Responsif
14. Meningkatkan Kualitas Dan Konektivitas Infrastruktur Daerah
15. Meningkatkan Kemampuan Mitigasi Bencana Daerah Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Berdasarkan telaahan terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran yaitu misi 1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama, misi Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal dan misi 5 Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel

Dalam menunjang misi ke satu, misi ke lima dan ke enam Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung oleh tiga sasaran yaitu ;

1. Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas
2. Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
3. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik

Sasaran tersebut Menjadikan masyarakat Pangandaran lebih sejahtera dengan Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, melalui pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Sosial, Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, dan Bidang Penataan, Kerjasama dan Adminitrasi Pemerintah Desa. Oleh karena itu, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran ingin Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat desa dengan bantuan dan dukungan OPD menjadikan masyarakat yang mandiri, maju dan sejahteran. Hal ini bisa menjadikan Pangandaran mempunyai masyarakat berkualitas yang bisa dikenal oleh masyarakat luar daerah maupun dunia. Hal ini sejalan dengan Visi ini berkaitan dengan visi Kabupaten Pangandaran yaitu Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa.

### **1.3 Isu Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

#### **1. Isu – Isu Stretegis**

Adapun permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

1. SDM Aparatur masih sangat terbatas baik kuantitas maupun kualitas.
2. Sarana dan prasanara perkantoran belum memadai.
3. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
4. Penyediaan sarana dan prasarana sosial.
5. Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat.
6. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu.

7. Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa masih belum optimal.
8. SDM Pengelolaan sistem keuangan desa perlu ditingkatkan.
9. Kapasitas masyarakat, permodalan, dukungan sarana dan prasarana ekonomi, serta pendampingan kepada rumah tangga kurang mampu dan miskin.
10. Peningkatan Kapasitas Pendampingan Aparatur Pemerintah dan Kelembagaan.
11. Ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah sangat tinggi.
12. Badan Usaha milik Desa (BUMDes) belum berkembang.
13. Koordinasi dan konsolidasi inter dan antar pemangku kepentingan.

## **2. Tema dan Prioritas Pembangunan di tahun 2021**

Tema RKPD tahun 2021 yaitu : "Pemantapan Capaian RPJMD 2016- 2021, Mewujudkan Pangandaran Sebagai Tujuan Wisata Berkelas Dunia Menuju Pembangunan Berkesinambungan". Sedangkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi
2. Kualitas Lingkungan Hidup
3. Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan,
4. Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata
5. Penurunan Resiko Bencana
6. Penguatan Kearifan Lokal
7. Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan
8. Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk serta
9. Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender
10. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)
11. Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **1. PERENCANAAN**

##### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang setidaknya memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Renstra ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

##### **a. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu sampai dengan satu tahun secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Prioritas pembangunan.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran yang berkaitan dengan Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Kabupaten Pangandaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut ;

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas	Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri
2	Meningkatnya cakupan penanganan PPKS	Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
3	Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Government)	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik	Nilai LHE AKIP Dinsos PMD

#### **b. Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama**

Sasaran strategis dan indikator Kinerja utama Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Sasaran strategis dan indicator kinerja utama (IKU)**

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>
1	Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas	Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri
2	Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
3	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik	Nilai LHE AKIP Dinsos PMD

#### **B. Perencanaan Kinerja Tahun 2021**

Kebijaksanaan dan program merupakan Stratejik atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan instansi pemerintah. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka

kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rensrta akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja merupakan pedoman bagi penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

**Tabel 2.3**  
**Kebijakan dan Program**

NO	Kebijakan	PROGRAM
1	2	3
1	Pembinaan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
2	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	
3	Peningkatan Pembinaan Kapasitas BUMDES	
4	Peningkatan Kapasitas Pendamping Aparatur Pemerintah dan Kelembagaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Posyandu	
6	Pengadaan Alat Bantu, Penanganan SPM serta Peningkatan Pembinaan PSKS	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL dan PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Singgah	
8	Pemberian Bantuan Sembako dan Alat Bantu Disabilitas Bagi Keluarga Miskin	
9	Pembentukan Kampung Siaga Bencana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
10	Fasilitasi Pembuatan Kartu Jamkesda atau BPJS Kesehatan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
11	Pengusulan, Penambahan dan Penyelenggaraan BIMTEK Pegawai ke BKPSDM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	

## 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan berisikan penugasan dari pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

## 1. Target Kinerja Sasaran

**Tabel 2.4**  
**Target Kinerja Sasaran**

### a. Target Kinerja Sasaran Kepala Dinas

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target
1.	Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas	Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri	50%
2.	Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	30%
3.	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik	Nilai LHE AKIP Dinsos PMD	89,38

### b. Target Kinerja Sasaran Sekretaris Dinas

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	90%

### c. Target Kinerja Sasaran Kepala Bidang Sosial

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Meningkatkan peran lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	50%
		Persentase Meningkatkan peran perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	60%
		Persentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	8%
		Persentase Keluarga miskin yang meningkat kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik	10%
		Persentase Korban Bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mampu bertahan hidup	100%
		Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola	100%

**d. Target Kinerja Sasaran Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif	100%

**e. Target Kinerja Sasaran Kepala Bidang Penataan Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas	Persentase Adminitrasi Desa yang baik dan tertib	50%

**f. Target Kinerja Sasaran Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Adminitrasi, Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah surat yang dikelola	1700 Lembar
		Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	5 Rekening
		Jumlah Kendaraan yang diservis dan berizin	13 Unit
		Jumlah SDM Kebersihan setiap bulan	3 Orang
		Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli	24 Jenis
		Jenis dan Jumlah Barang yang di cetak dan digandakan	3 Jenis
		Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	5 Jenis
		Jenis dan jumlah peralatan dan perlegkapan kantor yang dibeli	5 Jenis
		Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	8 Jenis
		Jenis dan jumlah bahan bacaan yang dibeli tiap bulan	2 Jenis
		Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli	2 Jenis
		Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	102 Kali
		Jumlah SDM pengamanan setiap bulan	2 Orang
		Jumlah SDM pengemudi setiap bulan	1 Orang
		Jumlah Waktu Penyediaan Gedung Kantor	1 Tahun
		Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 Unit
Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara rutin/berkala	16 Unit		
Jumlah unit peralatan kantor yang dipelihara	15 Unit		

**g. Target Kinerja Sasaran Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	Jumlah tenaga Jasa Operator Keuangan (SIMDA)	1 Orang
		Jumlah tenaga jasa operator barang daerah	1 Orang
		Jumlah Dokumen Keuangan Semesteran	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Renja, RKA dan DPA SKPD dan Perubahannya	6 Dokumen
		Jumlah Tenaga Jasa Operator Perencanaan	1 Orang
		Jumlah Dokumen Renstra Perubahan SKPD	1 Dokumen

**h. Target Kinerja Sasaran Kepala Seksi Penanganan dan Rehabilitasi Sosial**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Paket Logistik Untuk Permasalahan Sosial	350 Paket
		Jumlah Fakir Miskin yang dibantu	840 Orang
		Jumlah Orang Terlantar yang ditangani	20 Orang
		Jumlah Lansia Terlantar Yang ditangani	50 Orang
		Jumlah Disabilitas Yang ditangani	500 Orang
		Jumlah anak terlantar yang dibantu	50 Orang
		Jumlah Gelandangan Pengemis yang dibina	63 Orang
		Jumlah KK yang diberi Rutilahu	100 KK
Jumlah Kerjasama antar lembaga dalam kegiatan rehabilitasi sosial	1 Kerjasama		

**i. Target Kinerja Sasaran Kepala Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Iuran JKN	1 Dokumen
		Jumlah PKH yang dibina	62 Orang
		Jumlah anggota Tagana yang dibina	55 Orang
		Jumlah Anggota PSKS yang terlayani	12 Orang
		Jumlah Anggota Karang Taruna yang dibina	314 Orang

**j. Target Kinerja Sasaran Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif	Jumlah TTG yang Mengikuti Lomba	1 TTG
		Jumlah Kegiatan yang terdampingi	4 Kegiatan

**k. Target Kinerja Sasaran Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif	Jumlah Lembaga yang dibina	2 Lembaga
		Jumlah Anggota PKK yang dibina	300 Orang

**l. Target Kinerja Sasaran Kepala Seksi Penataan Desa**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase Administrasi Desa yang baik dan tertib	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa	93 Dokumen
		Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang dilatih dan dibina	186 Orang
		Jumlah Anggota BPD yang dibina	93 Orang
		Jumlah Desa yang sesuai dengan kriteria Lomba	10 Desa

**m. Target Kinerja Sasaran Kepala Seksi Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase Administrasi Desa yang baik dan tertib	Jumlah Dokumen Evaluasi Keuangan Desa	93 Dokumen

**n. Target Kinerja Sasaran Bendahara Pengeluaran**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran Berdasarkan DPA, Anggaran Kas dan SPD beserta lampirannya	90 Dokumen
		Menatausahakan penerimaan dan pengeluaran	90 Berkas
		Mencatat seluruh penerimaan berdasarkan SP2D yang diterima dan mencatat seluruh pengeluaran berdasarkan tanda bukti pengeluaran yang sah, secara tertib dan teratur ke dalam Buku Kas Umum serta mencatat bukti-bukti tsb ke dalam buku pembantu dan buku register lainnya	90 Berkas

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		Melakukan pemotongan pajak-pajak pembayaran yang dilakukan	90 Berkas
		mendokumentasikan seluruh tanda bukti penerimaan dan pengeluaran serta dokumen lainnya secara tertib dan teratur	10 Berkas

## 2. Target Kinerja Program

**Tabel 2.5**  
**Target Kinerja Program**

NO	SASARAN	PROGRAM	URAIAN		ANGGRAN BIAYA
			INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Administrasi Desa yang baik dan tertib	50%	56,870,000.00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	100%	2,193,817,550.00
2	Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase meningkatkan peran lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	50%	131,500,000.00
			Presentase meningkatkan peran perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	70%	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	8%	2,398,310,863.00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase Keluarga Miskin yang Meningkatkan Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik	10%	877,448,155.00

NO	SASARAN	PROGRAM	URAIAN		ANGGRAN BIAYA
			INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase Penanganan Korban Bencana yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya sehingga mampu Bertahan Hidup	100%	393,394,149.00
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase Taman Makam Makam Pahlawan yang di Kelola	100%	99,990,000.00
3	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	90% 100% 90% 100%	3,173,217,361.00

### 3. TARGET KINERJA KEGIATAN

**Tabel. 2.6**  
**Target Kinerja Kegiatan Tahun 2021**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN		ANGGRAN BIAYA
				INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>			1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90%	3,173,217,361.00
				2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%	
				3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	90%	
				4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN		ANGGRAN BIAYA
				INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	100%	38,400,000.00
				2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	100%	
				3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100%	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	2 Dokumen	46,800,000.00
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100%	2,647,015,806.00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan	16 Orang	2,542,015,806.00
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	105,000,000.00
		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	8 Jenis 208 Unit/Buah	21,000,000.00
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dikelola	8 Jenis 208 Unit/Buah	
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100%	17,400,000.00
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan	12 Kegiatan	17,400,000.00
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang	90%	100,463,155.00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN		ANGGRAN BIAYA
				INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
				baik		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 Jenis 34 Unit/buah	643,645.00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	32 Jenis 4699 Unit/buah	53,200,000.00
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 Jenis 13233 Unit/buah	2,619,510.00
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	16 Jenis 48 Eksemplar	24,000,000.00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	17 Kegiatan 17 Laporan	20,000,000.00
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100%	144,000,000.00
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1 Unit	144,000,000.00
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%	146,960,000.00
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	8620 Buah	1,000,000.00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	5 Rekening	48,560,000.00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan 8 Orang 4 Layanan	97,400,000.00
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	80%	57,978,400.00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN		ANGGRAN BIAYA
				INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2 Unit	24,358,000.00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	13 Unit	28,213,400.00
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola	7 Unit	3,750,000.00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	1 Unit	1,657,000.00
2	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>			Presentase meningkatkan peran lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	50%	131,500,000.00
				Presentase meningkatkan peran perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	70%	
		<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>		Jumlah Peningkatan Kemampuan SDM PSKS	13 Orang	131,500,000.00
				Jumlah partisipasi lembaga dalam penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	1 Lembaga	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah petugas dan pendamping sosial yang dilatih	13 Orang	131,500,000.00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN		ANGGRAN BIAYA
				INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
			Kewenangan Kabupaten/Kota			
3	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>			Presentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	8%	2,398,310,863.00
		<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>		Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar yang dibina	550 Orang	589,574,863.00
			Penyediaan Permakanan	Jumlah paket logistik untuk Permasalahan Sosial	350 Paket	379,354,263.00
				Jumlah Fakir Miskin yang dibantu	350 Orang	
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang terlantar yang ditangani	20 Orang	8,620,600.00
			Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Disabilitas yang dibantu	100 Orang	201,600,000.00
				Jumlah Lanjut Usia yang ditangani	50 Orang	
				Jumlah anak terlantar yang dibantu	20 Orang	
				Jumlah gelandangan dan pengemis yang dibina	10 Orang	
		<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>		Jumlah Rehabilitasi Sosial PPKS yang dibina	100 KK	1,808,736,000.00
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah KK yang diberi Rutilahu	100 KK	5,600,000.00
			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam kegiatan rehabilitasi sosial	1 Kerjasama	1,803,136,000.00
4	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN</b>			Presentase Keluarga Miskin yang Meningkatkan Kemampuannya	10%	877,448,155.00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN		ANGGRAN BIAYA
				INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>SOSIAL</b>			dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik		
		<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>		Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin yang berhak mendapatkan Bantuan	1 Dokumen	877,448,155.00
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PKH yang dibina	62 Orang	592,648,165.00
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data penerima bantuan bpjs kesehatan bagi keluarga miskin	1 Dokumen	284,799,990.00
				Jumlah dokumen data fakir miskin	1 Dokumen	
5	<b>PROGRAM PENANGANA N BENCANA</b>			Presentase Penanganan Korban Bencana yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya sehingga mampu Bertahan Hidup	100%	393,394,149.00
		<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>		Jumlah Kampung Siaga Bencana yang dibentuk serta dibina	2 Desa	393,394,149.00
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang dibina	55 Orang	393,394,149.00
6	<b>PROGRAM PENGELOLA AN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>			Presentase Taman Makam Makam Pahlawan yang di Kelola	100%	99,990,000.00
		<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>		Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	1 Taman Makam	99,990,000.00
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam taman pahlawan yang dipelihara	1 Taman Makam	99,990,000.00
7	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>			Presentase Administrasi Desa yang baik dan tertib	50%	56,870,000.00
		<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>		Jumlah Desa yang dibina dalam Penyelenggaraa n Administrasi Pemerintahan	93 Desa	56,870,000.00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN		ANGGRAN BIAYA
				INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
				Desa		
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Evaluasi Keuangan Desa	93 Dokumen	17,400,000.00
			Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen data profil desa	93 Dokumen	17,400,000.00
			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang sesuai kriteria lomba	10 Desa	22,070,000.00
8	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>			Presentase Lembaga Masyarakat Desa yang aktif	100%	2,193,817,550.00
		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	5 Lembaga	2,193,817,550.00
			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga yang dibina	2 Lembaga	881,200,000.00
			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah kegiatan yang terdampingi	2 Kegiatan	777,817,550.00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN		ANGGRAN BIAYA
				INDIKATOR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah anggota PKK yang dibina	300 Orang	534,800,000.00

### 3. Laporan Anggaran per Sasaran

**Tabel 2.7**  
**Laporan Anggaran per Sasaran Tahun 2021**

No	Sasaran	Anggaran
1	Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas	2,250,687,550
2	Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	3,900,643,167
3	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik	3,173,217,361
<b>JUMLAH</b>		<b>9,324,548,078</b>

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran kinerja merupakan alat untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam penyelenggaraan strategis untuk mencapai tujuan organisasi. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tujuan berjalan dengan target kinerja 5 (lima) Tahunan yang direncanakan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan sasaran kinerja, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas, selain itu untuk memberikan penilaian yang lebih independent demi menilai indikator, indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program /kegiatan untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan lain dengan dan kegagalan pencapaian sasaran pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja, pengukuran kinerja tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja melalui pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan yang berhubungan dengan sasaran tersebut.

Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja di kutip dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini.

**Tabel : 3.1 skala nilai peringkat kinerja**

No	Rencana Capaian	Kategori Capaian
1	$91 \leq$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Baik
3	$66 \leq 75$	Cukup Baik
4	$51 \leq 65$	Kurang baik
5	$\leq 50$	Sangat Kurang Baik

Capaian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 berdasarkan sasaran strategis sebagai berikut ;

### 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2021

Untuk membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2021, Metode yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran, apabila semakin tinggi realisasi diinterpretasikan sangat baik (melebihi target) dan menunjukkan semakin tingginya kinerja, atau sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukkan tidak tercapai target/sangat rendah berarti kinerja rendah.

Adapun capaian kinerja tahun 2021 sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dapat dilihat pada table di bawah ini :

#### a. Pengukuran capaian kinerja SKPD Per Sasaran

**Tabel : 3.2 Pengukuran capaian kinerja SKPD**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi akhir 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021
1	Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas	Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri	40%	50% (peningkatan 10%)	70,36% (peningkatan 30,36%)	(Capaian Peningkatan 303,6%)
2	Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan	27%	30% (peningkatan 3%)	39,52% (Peningkatan 12,52%)	(Capaian Peningkatan 417%)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi akhir 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021
	(PPKS)	an Sosial (PPKS)				
3	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik	Nilai LHE AKIP Dinsos PMD		89,38	87,59	97,99%

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian realisasi target Sasaran dapat tercapai dengan **Sangat Baik**, dikarenakan pencapaian dari setiap target Sasaran melebihi range **91%** . Adapun faktor yang mempengaruhi ketercapaian target Sasaran adalah sebagai berikut :

- Indikator Sasaran yang Pertama yaitu Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri dengan kondisi akhir pada tahun 2020 sebanyak 37 Desa atau 40%. Pada tahun 2021 target Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri sebanyak 6 Desa atau 10% sehingga target peningkatan status desa maju dan mandiri berada di angka 50%. Sedangkan realisasi peningkatan status desa maju dan mandiri sebanyak 17 Desa atau 30.36% sehingga realisasi peningkatan status desa maju dan mandiri berada di angka 70.36%.

Untuk capaian indikator sasaran Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri sebesar 303.6%

- Untuk Indikator Sasaran yang kedua yaitu Persentase Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan kondisi akhir pada tahun 2020 sebanyak 14.085 KPM atau 27%. Pada Tahun 2021 target Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebanyak 423 KPM atau 3% sehingga target Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) berada di angka 30%. Sedangkan realisasi Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di tahun 2021 sebanyak 1.764 KPM atau 12.52% sehingga target Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) berada di angka 39.52%.

Untuk capaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebesar 417%.

- Untuk Indikator Sasaran yang Ketiga yaitu Nilai LHE AKIP Dinsos PMD dengan Target nilai 89,39 % dan terrealisasi dengan nilai 87,59 % dengan pencapaian 97,99%.

No	Komponen yang dinilai	Bobot (%)	Nilai Evaluasi (%)
1	Perencanaan Kinerja	15	13,04
2	Pengukuran Kinerja	12,5	10,94
3	Pelaporan Kinerja	7,5	6,68
<b>Jumlah</b>		<b>35</b>	<b>30,66</b>
<b>Interpretasi Hasil Evaluasi (4/3x100%)</b>		<b>87,59</b>	

Sumber LHE Atas Implementasi Sakip DINSOPMD Tahun 2020 Nomor WAS.05.03/081.b/INSP.04/2021 Tanggal 30 Maret 2021

## b. Pengukuran capaian kinerja SKPD Per Program dan Kegiatan

**Tabel : 3.3 Pengukuran capaian kinerja SKPD**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN				ANGGRAN BIAYA
				INDIKATOR	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	6	7	8
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>			1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90%	90%	100%	3,173,217,361.00
				2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%	100%	100%	
				3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	90%	90%	100%	
				4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	100%	100%	
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	38,400,000.00
				2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	
				3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN				ANGGRAN BIAYA
				INDIKATOR	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	6	7	8
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	46,800,000.00
		<b>Administrasi Perangkat Daerah</b>		Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100%	100%	100%	2,647,015,806.00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan	16 Orang	16 Orang	100%	2,542,015,806.00
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	105,000,000.00
		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	8 Jenis	8 Jenis	100%	21,000,000.00
					208 Unit/Buah	208 Unit/Buah	100%	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dikelola	8 Jenis	8 Jenis	100%	21,000,000.00
					208 Unit/Buah	208 Unit/Buah	100%	
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100%	100%	100%	17,400,000.00
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100%	17,400,000.00
					12 Laporan	12 Laporan	100%	
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	90%	90%	100%	100,463,155.00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	100%	643,645.00
					34 Unit/buah	34 Unit/buah	100%	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	32 Jenis	32 Jenis	100%	53,200,000.00
					4699 Unit/buah	4699 Unit/buah	100%	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	3 Jenis	3 Jenis	100%	2,619,510.00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN				ANGGRAN BIAYA
				INDIKATOR	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	6	7	8
				yang disediakan	13233 Unit/buah	13233 Unit/buah	100%	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	16 Jenis	16 Jenis	100%	24,000,000.00
					48 Eksemplar	48 Eksemplar	100%	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	17 Kegiatan	17 Kegiatan	100%	20,000,000.00
					17 Laporan	17 Laporan	100%	
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100%	100%	100%	144,000,000.00
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1 Unit	1 Unit	100%	144,000,000.00
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%	100%	100%	146,960,000.00
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	8620 Buah	8620 Buah	100%	1,000,000.00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	5 Rekening	5 Rekening	100%	48,560,000.00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100%	97,400,000.00
					8 Orang	8 Orang	100%	
					4 Layanan	4 Layanan	100%	
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	80%	80%	100%	57,978,400.00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2 Unit	2 Unit	100%	24,358,000.00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya	13 Unit	13 Unit	100%	28,213,400.00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN				ANGGRAN BIAYA	
				INDIKATOR	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN		
1	2	3	4	5	6	6	7	8	
			Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan					
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola	7 Unit	7 Unit	100%	3,750,000.00	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%	1,657,000.00	
2	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>			Presentase meningkatkan peran lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	50%	50%	100%	131,500,000.00	
				Presentase meningkatkan peran perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	70%	70%	100%		
			<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>		Jumlah Peningkatan Kemampuan SDM PSKS	13 Orang	13 Orang	100%	131,500,000.00
					Jumlah partisipasi lembaga dalam penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah petugas dan pendamping sosial yang dilatih	13 Orang	13 Orang	100%	131,500,000.00
3		<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>			Presentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	8%	8%	100%	2,398,310,863.00
				<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,</b>		Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar yang dibina	550 Orang	550 Orang	100%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN				ANGGRAN BIAYA
				INDIKATOR	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	6	7	8
		<b>Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>						
			Penyediaan Permakanaan	Jumlah paket logistik untuk Permasalahan Sosial	350 Paket	350 Paket	100%	379,354,263.00
				Jumlah Fakir Miskin yang dibantu	350 Orang	350 Orang	100%	
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang terlantar yang ditangani	20 Orang	20 Orang	100%	8,620,600.00
			Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Disabilitas yang dibantu	100 Orang	0	0%	201,600,000.00
				Jumlah Lanjut Usia yang ditangani	50 Orang	0	0%	
				Jumlah anak terlantar yang dibantu	20 Orang	0	0%	
				Jumlah gelandangan dan pengemis yang dibina	10 Orang	0	0%	
		<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>		Jumlah Rehabilitasi Sosial PPKS yang dibina	100 KK	100 KK	100%	1,808,736,000.00
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah KK yang diberi Rutilahu	100 KK	100 KK	100%	5,600,000.00
			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam kegiatan rehabilitasi sosial	1 Kerjasama	1 Kerjasama	100%	1,803,136,000.00
4	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>			Presentase Keluarga Miskin yang Meningkatkan Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik	10%	10%	100%	877,448,155.00
		<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>		Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin yang berhak mendapatkan Bantuan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	877,448,155.00
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah	Jumlah PKH yang dibina	62 Orang	62 Orang	100%	592,648,165.00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN				ANGGRAN BIAYA
				INDIKATOR	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	6	7	8
			Kabupaten/Kota					
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data penerima bantuan bpjs kesehatan bagi keluarga miskin	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	284,799,990.00
				Jumlah dokumen data fakir miskin	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
5	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>			Presentase Penanganan Korban Bencana yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya sehingga mampu Bertahan Hidup	100%	100%	100%	393,394,149.00
		<b>Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>		Jumlah Kampung Siaga Bencana yang dibentuk serta dibina	2 Desa	2 Desa	100%	393,394,149.00
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang dibina	55 Orang	55 Orang	100%	393,394,149.00
6	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>			Presentase Taman Makam Makam Pahlawan yang di Kelola	100%	100%	100%	99,990,000.00
		<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>		Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	1 Taman Makam	1 Taman Makam	100%	99,990,000.00
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam taman pahlawan yang dipelihara	1 Taman Makam	1 Taman Makam	100%	99,990,000.00
7	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>			Presentase Administrasi Desa yang baik dan tertib	50%	50%	100%	56,870,000.00
		<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>		Jumlah Desa yang dibina dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	93 Desa	93 Desa	100%	56,870,000.00
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Evaluasi Keuangan Desa	93 Dokumen	93 Dokumen	100%	17,400,000.00
			Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen data profil desa	93 Dokumen	93 Dokumen	100%	17,400,000.00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN				ANGGRAN BIAYA
				INDIKATOR	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	6	7	8
			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang sesuai kriteria lomba	10 Desa	10 Desa	100%	22,070,000.00
8	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>			Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	100%	100%	100%	2,193,817,550.00
		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	5 Lembaga	5 Lembaga	100%	2,193,817,550.00
			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga yang dibina	2 Lembaga	2 Lembaga	100%	881,200,000.00
			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah kegiatan yang terdampingi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	777,817,550.00
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah anggota PKK yang dibina	300 Orang	300 Orang	100%	534,800,000.00

## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam penyelenggaraan strategis perlu adanya perbandingan dengan tahun sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui capaian kinerja tahun berjalan. Perbandingan capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun sebelumnya (2019) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.4**

### 1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun sebelumnya (2020)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas	Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri	50% (peningkatan 10%)	70,36% (peningkatan 30,36%)	
2	Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	30% (peningkatan 3 %)	39,52% (Peningkatan 12,52%)	
3	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik	Nilai LHE AKIP Dinsos PMD	89,38	87,59	
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD			A (89.37)
2	Meningkatnya PMKS yang Mandiri	Persentase PMKS yang Mandiri			21,38 % (3.914)
3	Menurunnya kesenjangan antar wilayah	Indek Gini			0,335

Dari tabel di atas menjelaskan adanya perubahan nomenklatur sasaran dan indikator sasaran pada tahun 2020 dan 2021 dikarenakan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026.

Adapun faktor yang mempengaruhi ketercapaian target Sasaran Tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut :

- Indikator Sasaran yang Pertama yaitu Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri dengan kondisi akhir pada tahun 2020 sebanyak 37 Desa atau 40%. Pada tahun 2021 target Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri sebanyak 6 Desa atau 10% sehingga target peningkatan status desa maju dan mandiri berada di angka 50%. Sedangkan realisasi peningkatan status desa maju dan mandiri sebanyak 17 Desa atau 30.36% sehingga realisasi peningkatan status desa maju dan mandiri berada di angka 70.36%.

Untuk capaian indikator sasaran Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri sebesar 303.6%. Sementara untuk indikator sasaran 2020 yaitu indek gini dengan realisasi di angka 0,335.

- Untuk Indikator Sasaran yang kedua yaitu Persentase Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan kondisi akhir pada tahun 2020 sebanyak 14.085 KPM atau 27%. Pada Tahun 2021 target Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebanyak 423 KPM atau 3% sehingga target Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) berada di angka 30%. Sedangkan realisasi Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di tahun 2021 sebanyak 1.764 KPM atau 12.52% sehingga target Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) berada di angka 39.52%.

Untuk capaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebesar 417%. Sementara untuk indikator sasaran 2020 yaitu Persentase PMKS yang Mandiri dengan realisasi di angka 21,38 % (3.914)

- Untuk Indikator Sasaran yang Ketiga yaitu Nilai LHE AKIP Dinsos PMD dengan Target nilai 89,39 % dan terrealisasi dengan nilai 87,59 % dengan pencapaian 97,99%. Sementara untuk indikator sasaran 2020 yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD terrealisasi A (89,37)

## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun sebelumnya (2020)

Untuk penyajian tabel Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 disajikan dalam bentuk tabel terpisah dikarenakan untuk tahun 2021 sudah mengacu pada program RPJMD 2021-2026.

NO	PROGRAM	KEGIATAN	URAIAN			
			INDIKATOR	TARGET 2020	REALISASI TARGET 2020	CAPAIAN 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi perkantoran		Cakupan layanan perkantoran	80%	80%	100%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikelola	1700 Lembar	1700 Lembar	100%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	5 Rekening	5 Rekening	100%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang diservis dan berizin	13 Unit	13 Unit	100%
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah SDM Kebersihan setiap bulan	3 Orang	3 Orang	100%
		Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah SDM Pengamanan setiap Bulan	2 Orang	2 Orang	100%
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli	24 Jenis	24 Jenis	100%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis dan Jumlah Barang yang dicetak dan digandakan	3 Jenis	3 Jenis	100%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	URAIAN			
			INDIKATOR	TARGET 2020	REALISASI TARGET 2020	CAPAIAN 2020
1	2	3	4	5	6	7
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	5 Jenis	5 Jenis	100%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang dibeli	5 Jenis	5 Jenis	100%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis dan Jumlah Peralatan rumah tangga yang dibeli	8 Jenis	8 Jenis	100%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jenis dan Jumlah bahan bacaan yang dibeli tiap bulan	2 Jenis	2 Jenis	100%
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang diikuti	102 Kali	102 Kali	100%
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah yang diikuti	40 Kali	0	0%
		Penyediaan Jasa Pengemudi	Jumlah SDM pengemudi setiap bulan	1 Orang	1 Orang	100%
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis dan Jumlah makanan dan minuman yang dibeli			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Kondisi Baik	90%	90%	100%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 Unit	2 Unit	100%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	URAIAN			
			INDIKATOR	TARGET 2020	REALISASI TARGET 2020	CAPAIAN 2020
1	2	3	4	5	6	7
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jenis dan Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara rutin/berkala	16 Unit	16 Unit	100%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	15 Jenis	15 Jenis	100%
		Penyediaan Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang disewa	1 Tahun	1 Tahun	100%
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Cakupan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang baik	100%	100%	100%
		Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	Dokumen Perencanaan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Dokumen Laporan Rekon Keuangan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Barang Daerah	Dokumen Laporan Rekon Aset	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
4	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		Persentase Jumlah PMKS yang dibina	0,1%	0,1%	100%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	URAIAN			
			INDIKATOR	TARGET 2020	REALISASI TARGET 2020	CAPAIAN 2020
1	2	3	4	5	6	7
		Verifikasi dan Validasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN)	Jumlah Dokumen Data penerima Bantuan Iuran JKN	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Pembinaan PKH	Jumlah PKH yang dibina	62 Orang	62 Orang	100%
		Pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial (LK3)	Jumlah kasus kekerasan keluarga yang tertangani	10 Kasus	10 Kasus	100%
		Pemantapan TAGANA	Jumlah yang dibina	55 Orang	55 Orang	100%
		Pengelolaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah anggota PSKS yang terlayani	12 Orang	12 Orang	100%
		Verifikasi dan Validasi BDT	Jumlah data miskin yang diverifikasi dan validadasi	49000 KK	0	0%
		Pengadaan Mobil Tagana	Jumlah Mobil	1 Unit	1 Unit	100%
		Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda) Lansia	Jumlah Laporan Kegiatan Komda Lansia untuk meningkatkan efektifitas penanganan lansia di kabupaten pangandaran			
		Penguatan Lembaga TKPKD (Banprov)	Jumlah Inovasi Kelompok masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan			
5	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	0,1%	0,1%	100%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	URAIAN			
			INDIKATOR	TARGET 2020	REALISASI TARGET 2020	CAPAIAN 2020
1	2	3	4	5	6	7
		Buffer Stoke Permasalahan Sosial	Jumlah Paket Logistik untuk permasalahan sosial	300 Paket	0%	0%
		Penanganan Orang Terlantar	Jumlah orang terlantar yang ditangani	30 Orang	30 Orang	100%
		Pendampingan Rutilahu	Jumlah KK yang diberi Rutilahu	100 KK	100 KK	100%
		Bantuan Bagi Keluarga Miskin	Jumlah keluarga miskin yang diberi bantuan	2481 Orang	2481 Orang	100%
		Penanggulangan Darurat Bencana di Kabupaten Pangandaran (Covid-19)	Jumlah penyelenggaraan penanggulangan darurat di Kabupaten Pangandaran	2 bulan	2 bulan	100%
		Operasional TKSK dan TKS	Jumlah Anggota yang terlayani			
		Pemantapan Anggota Tagana	Jumlah Anggota Tagana yang dilatih			
6	Program Pengelolaan Area Pemakaman		Persentase Jumlah taman Makam yang dikelola	90%	90%	100%
		Pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	Jumlah Taman Makam Pahlawan dipelihara	1 Taman Makam	1 Taman Makam	100%
		Peringatan Hari Pahlawan	Jumlah kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
7	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		Persentase Lembaga Kesejahteraan Keluarga Sosial (LKS) yang dibina			
		Bimbingan motifasi sosial bagi generasi muda dlm penanggulangan penyalahgunaan NAFZA	Jumlah Peserta Sosialisasi			

NO	PROGRAM	KEGIATAN	URAIAN			
			INDIKATOR	TARGET 2020	REALISASI TARGET 2020	CAPAIAN 2020
1	2	3	4	5	6	7
8	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		Persentase masyarakat perdesaan yang dibina	20%	20%	100%
		Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK	Jumlah Peserta Anggota PKK yang dibina	300 Orang	300 Orang	100%
		Pendampingan BSMSS	Jumlah Kegiatan BSMSS yang terdampingi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
		Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pencanaan BBGRM	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan	93 Orang	93 Orang	100%
		TNI Manunggal Membangun Desa (Desa Putra Pinggan) (Dusun Bojong RT.01-02 RW.06 Kel. PUTRAPINGGAN, Kec. KALIPUCANG, Kab. Pangandaran) (Banprov)	Jumlah Panjang Jalan yang dibangun	250 m	0	0%
		Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) (1 Desa Kertamukti) (Dusun Campaka RT.01 RW.01, Kel. KERTAMUKTI, Kec. CIMERAK, Kab. Pangandaran) (Banprov)	Jumlah Panjang Jalan yang dibangun	215 m	215 m	100%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	URAIAN			
			INDIKATOR	TARGET 2020	REALISASI TARGET 2020	CAPAIAN 2020
1	2	3	4	5	6	7
		Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) (Kabupaten Pangandaran) (Kabupaten Pangandaran, Kab. Pangandaran) (Banprov)	Jumlah kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam gotong royong	3 Kelompok	3 Kelompok	100%
		Pendampingan TMMD	Jumlah Kegiatan TMMD yang terdampingi			
		Pembinaan PKK Kecamatan dan Desa	Jumlah Anggota PKK Kecamatan dan Desa yang dibina			
9	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		Persentase Desa yang mendirikan Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa)	20%	0	0%
		Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	Jumlah BUMDES yang dibina	15 BUMDES	0	0%
10	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		Persentase Kader Pembangunan Masyarakat Desa yang dibina	20%	20%	100%
		Pembinaan Kelembagaan Posyandu	Jumlah Kader Posyandu yang dibina dan jumlah bangunan posyandu yang dibangun	5169 Orang dan 4 Bangunan Posyandu	5169 Orang	70%
		Revitalisasi Posyandu Lanjutan (Banprov)	Jumlah Bangunan Posyandu yang terbangun			
11	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang dapat memahami penyelenggaraan Pemerintahan Desa	25%	25%	100%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	URAIAN			
			INDIKATOR	TARGET 2020	REALISASI TARGET 2020	CAPAIAN 2020
1	2	3	4	5	6	7
		Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang dilatih	2062 Orang 93 Desa	2062 Orang 93 Desa	100%
		Evaluasi Kinerja Pembangunan Masyarakat Desa (Perlombaan Desa)	Jumlah Desa yang sesuai kriteria	10 Desa	10 Desa	100%
		Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa	Jumlah dokumen data profil desa	93 Desa	93 Desa	100%
		Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Kepala Desa Terpilih			
12	Program Penataan Administrasi Desa dan Pengelolaan Aset Desa		Persentase Desa Yang memiliki Administrasi Desa dan Pengelolaan Aset Desa yang Baik	25%	25%	100%
		Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Keuangan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Evaluasi Bantuan Keuangan Desa	Jumlah dokumen evaluasi keuangan desa	93 Dokumen	93 Dokumen	100%
		Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Dana Desa	Jumlah dokumen monev dana desa	93 Dokumen	93 Dokumen	100%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN			
				INDIKATOR	TARGET 2021	REALISASI TARGET 2021	CAPAIAN 2021
1	2	3	4	5	6	6	7
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90%	90%	100%
				2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%	100%	100%
				3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	90%	90%	100%
				4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	100%	100%
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%
				2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%
				3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100%	100%	100%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN			
				INDIKATOR	TARGET 2021	REALISASI TARGET 2021	CAPAIAN 2021
1	2	3	4	5	6	6	7
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitas penyediaan gaji dan tunjangan	16 Orang	16 Orang	100%
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	8 Jenis	8 Jenis	100%
					208 Unit/Buah	208 Unit/Buah	100%
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dikelola	8 Jenis	8 Jenis	100%
					208 Unit/Buah	208 Unit/Buah	100%
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100%	100%	100%
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100%
					12 Laporan	12 Laporan	100%
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	90%	90%	100%
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	100%
					34 Unit/buah	34 Unit/buah	100%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN			
				INDIKATOR	TARGET 2021	REALISASI TARGET 2021	CAPAIAN 2021
1	2	3	4	5	6	6	7
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	32 Jenis	32 Jenis	100%
					4699 Unit/buah	4699 Unit/buah	100%
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	100%
					13233 Unit/buah	13233 Unit/buah	100%
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	16 Jenis	16 Jenis	100%
					48 Eksemplar	48 Eksemplar	100%
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	17 Kegiatan	17 Kegiatan	100%
					17 Laporan	17 Laporan	100%
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100%	100%	100%
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1 Unit	1 Unit	100%
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>		Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%	100%	100%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN			
				INDIKATOR	TARGET 2021	REALISASI TARGET 2021	CAPAIAN 2021
1	2	3	4	5	6	6	7
		<b>Daerah</b>					
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	8620 Buah	8620 Buah	100%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	5 Rekening	5 Rekening	100%
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100%
					8 Orang	8 Orang	100%
					4 Layanan	4 Layanan	100%
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	80%	80%	100%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2 Unit	2 Unit	100%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	13 Unit	13 Unit	100%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN			
				INDIKATOR	TARGET 2021	REALISASI TARGET 2021	CAPAIAN 2021
1	2	3	4	5	6	6	7
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola	7 Unit	7 Unit	100%
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%
2	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>			Presentase meningkatkan peran lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	50%	50%	100%
				Presentase meningkatkan peran perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	70%	70%	100%
		<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>		Jumlah Peningkatan Kemampuan SDM PSKS	13 Orang	13 Orang	100%
				Jumlah partisipasi lembaga dalam penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	1 Lembaga	1 Lembaga	100%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN			
				INDIKATOR	TARGET 2021	REALISASI TARGET 2021	CAPAIAN 2021
1	2	3	4	5	6	6	7
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah petugas dan pendamping sosial yang dilatih	13 Orang	13 Orang	100%
3	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>			Presentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	8%	8%	100%
		<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>		Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar yang dibina	550 Orang	550 Orang	100%
			Penyediaan Permakanan	Jumlah paket logistik untuk Permasalahan Sosial	350 Paket	350 Paket	100%
				Jumlah Fakir Miskin yang dibantu	350 Orang	350 Orang	100%
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang terlantar yang ditangani	20 Orang	20 Orang	100%
			Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak	Jumlah Disabilitas yang dibantu	100 Orang	0	0%
				Jumlah Lanjut Usia yang ditangani	50 Orang	0	0%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN			
				INDIKATOR	TARGET 2021	REALISASI TARGET 2021	CAPAIAN 2021
1	2	3	4	5	6	6	7
			Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah anak terlantar yang dibantu	20 Orang	0	0%
				Jumlah gelandangan dan pengemis yang dibina	10 Orang	0	0%
		<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>		Jumlah Rehabilitasi Sosial PPKS yang dibina	100 KK	100 KK	100%
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah KK yang diberi Rutilahu	100 KK	100 KK	100%
			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam kegiatan rehabilitasi sosial	1 Kerjasama	1 Kerjasama	100%
4	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>			Presentase Keluarga Miskin yang Meningkatkan Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik	10%	10%	100%
		<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>		Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin yang berhak mendapatkan Bantuan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN			
				INDIKATOR	TARGET 2021	REALISASI TARGET 2021	CAPAIAN 2021
1	2	3	4	5	6	6	7
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PKH yang dibina	62 Orang	62 Orang	100%
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data penerima bantuan bpjs kesehatan bagi keluarga miskin	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
				Jumlah dokumen data fakir miskin	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>			Presentase Penanganan Korban Bencana yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya sehingga mampu Bertahan Hidup	100%	100%	100%
		<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>		Jumlah Kampung Siaga Bencana yang dibentuk serta dibina	2 Desa	2 Desa	100%
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang dibina	55 Orang	55 Orang	100%
6	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>			Presentase Taman Makam Makam Pahlawan yang di Kelola	100%	100%	100%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN			
				INDIKATOR	TARGET 2021	REALISASI TARGET 2021	CAPAIAN 2021
1	2	3	4	5	6	6	7
		<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>		Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	1 Taman Makam	1 Taman Makam	100%
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam taman pahlawan yang dipelihara	1 Taman Makam	1 Taman Makam	100%
7	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>			Presentase Administrasi Desa yang baik dan tertib	50%	50%	100%
		<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>		Jumlah Desa yang dibina dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	93 Desa	93 Desa	100%
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Evaluasi Keuangan Desa	93 Dokumen	93 Dokumen	100%
			Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen data profil desa	93 Dokumen	93 Dokumen	100%
			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang sesuai kriteria lomba	10 Desa	10 Desa	100%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN			
				INDIKATOR	TARGET 2021	REALISASI TARGET 2021	CAPAIAN 2021
1	2	3	4	5	6	6	7
8	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>			Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	100%	100%	100%
		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	5 Lembaga	5 Lembaga	100%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN			
				INDIKATOR	TARGET 2021	REALISASI TARGET 2021	CAPAIAN 2021
1	2	3	4	5	6	6	7
			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga yang dibina	2 Lembaga	2 Lembaga	100%
			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah kegiatan yang terdampingi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah anggota PKK yang dibina	300 Orang	300 Orang	100%

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi s/d Tahun 2021	Target Jangka Menengah	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Realisasi s/d Tahun 2021	Target Jangka Menengah
1	Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas	Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri	70,36% (peningkatan 30,36%)	100%	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Administrasi Desa yang baik dan tertib	50%	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	100%	100%
2	Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	39,52% (Peningkatan 12,52%)	77%	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase meningkatkan peran lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan social	50%	80%
						Presentase meningkatkan peran perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan social	70%	100.00%
						Presentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	8%	48,2%
					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase Keluarga Miskin yang Meningkatkan Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik	10%	60%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi s/d Tahun 2021	Target Jangka Menengah	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Realisasi s/d Tahun 2021	Target Jangka Menengah
					PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase Penanganan Korban Bencana yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya sehingga mampu Bertahan Hidup	100%	100%
					PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase Taman Makam Pahlawan yang di Kelola	100%	100%
3	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik	Nilai LHE AKIP Dinsos PMD	87,59	89,87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90%	95%
						2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%	100%
						3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	90%	95%
						4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	100%

Adapun faktor yang mempengaruhi ketercapaian target Sasaran Tahun 2021 dan target RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Untuk Indikator Sasaran yang pertama yaitu Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri pada tahun 2020 mendapat 70,36%. Dengan hasil tersebut Artinya tinggal 29,64 untuk memenuhi Target Jangka Menengah.
2. Untuk Indikator Sasaran yang kedua yakni Persentase Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada tahun 2020 mendapat 39,52%. Dengan hasil tersebut Artinya tinggal 37,48 untuk memenuhi Target Jangka Menengah
3. Untuk Indikator Sasaran yang kedua yakni Nilai LHE AKIP Dinsos PMD pada tahun 2020 mendapat nilai 87,59. Dengan hasil tersebut Artinya tinggal 2,28 untuk memenuhi Target Jangka Menengah
4. Untuk Program yang tercantum pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah selaras dengan RPJMD Kabupaten Pangandaran dan Realisasi Program tercapai 100% dengan target yang di tentukan di RPJMD Kabupaten Pangandaran,

#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Standar Nasional

**Tabel 3.6**

**Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 Dengan Standar Nasional**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Standar Nasional
1	Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas	Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri	70,36% (peningkatan 30,36%)	N/A
2	Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	39,52% (Peningkatan 12,52%)	N/A
3	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik	Nilai LHE AKIP Dinsos PMD	87,59	N/A

Adapun faktor yang mempengaruhi ketercapaian target Sasaran Tahun 2021 dan Standar Nasional 2021 adalah sebagai berikut :

1. Untuk Indikator Sasaran yang pertama yaitu Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri pada tahun 2020 mendapat 70,36%. Sementara Standar Nasional tidak diketahui.
2. Untuk Indikator Sasaran yang kedua yakni Persentase Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada tahun 2020 mendapat 39,52%. Sementara Standar Nasional tidak diketahui.
3. Untuk Indikator Sasaran yang kedua yakni Nilai LHE AKIP Dinsos PMD pada tahun 2020 mendapat nilai 87,59. Sementara Standar Nasional tidak diketahui.

#### 5. Analisis penyebab penurunan kinerja dan solusi yang telah dilakukan

**Tabel 3.7**

**Analisis penyebab penurunan kinerja dan solusi yang telah dilakukan**

No	Sasaran	Penurunan	Solusi
1	Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas	Tidak ada Penurunan	

No	Sasaran	Penurunan	Solusi
2	Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Tidak ada Penurunan	
3	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik	Tidak ada Penurunan	

## 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

**Tabel 3.8**  
**Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

NO	SASARAN	EFISIENSI/TIDAK EFISIENSI	ALASAN
1	2	3	4
1	Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas	<b>Efisien</b>	
2	Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	<b>Efisien</b>	
3	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik	<b>Efisien</b>	

## 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja

**Tabel 3.9**  
**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja**

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG	PROGRAM/KEGIATAN YANG TIDAK MENUNJANG
1	2	3	4
1	Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
2	Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG	PROGRAM/KEGIATAN YANG TIDAK MENUNJANG
1	2	3	4
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
3	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

### B. Realisasi Anggaran

Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran yaitu misi 1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama, misi Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal dan misi 5 Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel Dalam menunjang misi ke satu, misi ke lima dan ke enam Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung oleh tiga sasaran yaitu ;

1. Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas
2. Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
3. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik

Berdasarkan sasaran strategis yang diampu oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran dengan total pagu anggaran perubahan 2021 sebesar Rp. 9,324,548,078.00 terealisasi sebesar Rp. 5,229,412,536.00 dengan persentase capaian sebesar 56,08%. Untuk melihat efektifitas dan efisiensi anggaran masing- masing sasaran dapat dilihat pada tabel 3.9 di bawah ini.

**Tabel 3.10**  
**Analisis Realisasi Program**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas	Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri	(Capaian Peningkatan 303,6%)	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	56,870,000.00	54,070,000.00	95.08%
				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2,193,817,550.00	1,285,935,250.00	58.62%
					2,250,687,550.00	1,340,005,250.00	59.54%
2	Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	(Capaian Peningkatan 417%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	131,500,000.00	68,990,145.00	52.46%
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2,398,310,863.00	928,311,150.00	38.71%
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	877,448,155.00	461,124,239.00	52.55%
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	393,394,149.00	191,766,966.00	48.75%
				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	99,990,000.00	31,660,000.00	31.66%
	3,900,643,167.00	1,681,852,500.00	43.12%				
3	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik	Nilai LHE AKIP Dinsos PMD	97,99%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,173,217,361.00	2,207,554,786.00	69.57%

Berdasarkan tabel 3.10 diatas, pencapaian sasaran misi ke 1 RPJMD Kabupaten Pangandaran yang ditunjang oleh Sasaran Renstra OPD yaitu "Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas" dikatakan efektif dan efisien karena dari total pagu sebesar Rp. 2,250,687,550.00 terealisasi sebesar Rp. 1,340,005,250.00 atau apabila di persentasekan sebesar 59.54%, sementara capaian kinerjanya sebesar (Capaian Peningkatan 303,6%). Untuk pencapaian sasaran misi ke 4 RPJMD Kabupaten Pangandaran yang ditunjang oleh Sasaran Renstra OPD yaitu "Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)" dikatakan efektif dan efisien karena dari total pagu sebesar Rp. 3,900,643,167.00 terealisasi sebesar Rp. 1,681,852,500.00 atau apabila di persentasekan sebesar 43.12% sementara capaian kinerjanya sebesar (Capaian Peningkatan 417%). Dan Pencapaian sasaran misi ke 5 RPJMD Kabupaten Pangandaran yang ditunjang oleh Sasaran Renstra OPD yaitu "Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik" dikatakan efektif dan efisien karena dari total pagu sebesar Rp. 3,173,217,361.00 terealisasi sebesar Rp. 2,207,554,786.00 atau apabila di persentasekan sebesar 69.57%, sementara capaian kinerjanya sebesar 97,99%.

## BAB IV PENTUP

Berdasarkan hasil pengukuran atas capaian Tahun 2021, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Target Sasaran Dinsos PMD Tahun 2021 semua tercapai.
2. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 4,095,135,542.00

Langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2022 untuk meningkatkan kinerja antara lain :

1. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan kinerja aparatur ;
2. Optimalisasi kinerja aparatur dengan peningkatan intensitas kinerja aparatur;
3. Peningkatan SDM dengan pelatihan, bimbingan teknis dan Focus Group Discussion (FGD).
4. Menurunkan angka kemiskinan dengan Program dan Kegiatan Unggulan
5. Pembinaan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa untuk meningkatkan Indek Desa Membangun Kabupaten Pangandaran
6. Memperbaiki sistem Pengumpulan dan Pengolahan data Kinerja agar pemenuhan indikator sasaran organisasi dapat dilaksanakan secara maksimal
7. Koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik ditingkat kabupaten maupun ditingkat kecamatan agar pemenuhan indikator bisa tercapai secara maksimal.

KEPALA,  
DINSOSPMD KAB. PANGANDARAN



**H. WAWAN KUSTAMAN, S.Pd., MM.**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670722 199307 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS SOSIAL,**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Jln. Raya Parigi No. 180 RT 03/RW 04 Parigi Telp./Fax. (0265) 2640972 Parigi 46393

---

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. WAWAN KUSTAMAN, S.Pd.,MM  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. JEJE WIRADINATA  
Jabatan : Bupati Pangandaran  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 04 Januari 2021

PIHAK KEDUA,  
  
**H. JEJE WIRADINATA**

PIHAK PERTAMA  
  
**H. WAWAN KUSTAMAN, S.Pd., MM**  
NIP. 19670722 199307 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA DINSOSPMD 2021****PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN****A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1.	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai	A
2.	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	10
3.	Meningkatnya tata kelola dan kinerja pemerintahan desa yang efektif	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6970

**B. PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>JUMLAH ANGGARAN (Rp.)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>PROGRAM UTAMA</b>		
1	Program Pemberdayaan Sosial	278.000.000,00
2	Program Rehabilitasi Sosial	2.053.219.405,00
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	435.600.000,00
4	Program Penanganan Bencana	340.040.000,00
5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	25.500.000,00
6	Program Administrasi Pemerintahan Desa	219.600.000,00
7	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	12.107.187.750,00
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>15.459.147.155,00</b>

NO	PROGRAM KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)
1	2	3
<b>PROGRAM PENDUKUNG</b>		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.840.393.839,00
<b>JUMLAH PROGRAM PENDUKUNG</b>		<b>3.840.393.839,00</b>
<b>TOTAL ANGGARAN KESELURUHAN</b>		<b>19.299.540.994,00</b>

PIHAK KEDUA,



**H. JEJE WIRADINATA**

Parigi, 04 Januari 2021

PIHAK PERTAMA



**H. WAWAN KUSTAMAN, S.Pd., MM**

NIP. 19670722 199307 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS SOSIAL,**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Jln. Raya Parigi No. 180 RT 03/RW 04 Parigi Telp./Fax. (0265) 2640972 Parigi 46393

---

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : TJOMI SURYADI, S.Sos.,MM  
Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. WAWAN KUSTAMAN, S.Pd., MM  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 04 Januari 2021

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA

  
**H. WAWAN KUSTAMAN, S.Pd., MM**  
NIP. 19670722 199307 1 001

  
**TJOMI SURYADI, S.Sos., MM**  
NIP. 19630806 199003 1 007

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA DINSOSPMD 2021**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN**

**A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR / OUTCOME	SATUAN	TARGET
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	90

## B. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)
1	2	3
<b>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>3.840.393.839,00</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>46.800.000,00</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.800.000,00
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>3.062.800.932,00</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.949.400.932,00
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	113.400.000,00
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>27.000.000,00</b>
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.000.000,00
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>22.920.000,00</b>
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	22.920.000,00
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>207.140.000,00</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.340.000,00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	142.800.000,00
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>218.826.007,00</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.791,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.290.962,00
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.004.654,00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.295.600,00
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.200.000,00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.034.000,00

	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>150.000.000,00</b>
1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000,00
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>104.906.900,00</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.925.000,00
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.659.900,00
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.250.000,00
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.072.000,00
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>3.840.393.839,00</b>

Parigi, 04 Januari 2020

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA



**H. WAWAN KUSTAMAN, S.Pd., MM**  
NIP. 19670722 199307 1 001

**TJOMI SURYADI, S.Sos., MM**  
NIP. 19630806 199003 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS SOSIAL,**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Jln. Raya Parigi No. 180 RT 03/RW 04 Parigi Telp./Fax. (0265) 2640972 Parigi 46393

---

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : TRISNADI KHOLIK, S.Pd. MM  
Jabatan : Kabid Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pemberdayaan Lembaga  
Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. WAWAN KUSTAMAN, S.Pd., MM  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 04 Januari 2021

PIHAK KEDUA,

**H. WAWAN KUSTAMAN, S.Pd., MM**  
NIP. 19670722 199307 1 001

PIHAK PERTAMA

**TRISNADI KHOLIK, S.Pd. MM**  
NIP. 19710221 199307 1 002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA DINSOSPMD 2021**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN**

**A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA**

No	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME PROGRAM	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya tata kelola dan kinerja pemerintahan desa yang efektif	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	%	100

**B. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)
<b>1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b>		<b>12.107.187.750,00</b>
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>12.107.187.750,00</b>
1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	11.267.950.000,00
2	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	15.000.000,00
3	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	34.637.750,00
4	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	789.600.000,00
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>12.107.187.750,00</b>

PIHAK KEDUA,



**H. WAWAN KUSTAMAN, S.Pd., MM**  
NIP. 19670722 199307 1 001

Parigi, 04 Januari 2020

PIHAK PERTAMA

**TRISNADI KHOLIK, S.Pd. MM**  
NIP. 19710221 199307 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS SOSIAL,**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Jln. Raya Parigi No. 180 RT 03/RW 04 Parigi Telp./Fax. (0265) 2640972 Parigi 46393

---

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : YAYAT AHADIAT, SH.M.Si  
Jabatan : Kabid Penaatan, Kerjasama dan Adminitrasi Pemerintahan Desa  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. WAWAN KUSTAMAN, S.Pd., MM  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 04 Januari 2021

PIHAK PERTAMA

YAYAT AHADIAT, SH., M.Si  
NIP. 19700712 199803 1 010

PIHAK KEDUA,

H. WAWAN KUSTAMAN, S.Pd., MM  
NIP. 19670722 199307 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN DINSOSPMD 2021**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN**

**A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA**

No	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME PROGRAM	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya tata kelola dan kinerja pemerintahan desa yang efektif	Persentase Administrasi Desa yang baik dan tertib	%	50

**B. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)
1	2	3
<b>1. Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>		<b>219.600.000,00</b>
<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>		<b>219.600.000,00</b>
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	30.000.000,00
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	19.800.000,00
3	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	70.000.000,00
4	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	19.800.000,00
5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	30.000.000,00
6	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	50.000.000,00
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>219.600.000,00</b>

PIHAK KEDUA,



**H. WAWAN KUSTAMAN, S.Pd., MM**  
NIP. 19670722 199307 1 001

Parigi, 04 Januari 2021  
PIHAK PERTAMA



**YAYAT AHADIAT, SH., M.Si**  
NIP. 19700712 199803 1 010



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS SOSIAL,**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Jln. Raya Parigi No. 180 RT 03/RW 04 Parigi Telp./Fax. (0265) 2640972 Parigi 46393

---

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dra. DEWI SUNDARI, MM

Jabatan : Kabid Sosial

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. WAWAN KUSTAMAN, S.Pd., MM

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 04 Januari 2021

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA



**H. WAWAN KUSTAMAN, S.Pd., MM**  
NIP. 19670722 199307 1 001

**Dra. DEWI SUNDARI, MM**  
NIP. 19651123 199312 2 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA DINSOSPMD 2021****PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN****A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA**

No	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME PROGRAM	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Presentase meningkatkan peran lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	50 60
		2. Presentase meningkatkan peran perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan		
		Presentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	%	8
		Presentase Keluarga Miskin yang Meningkatkan Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik	%	10
		Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mampu bertahan hidup	%	100
Persentase Taman Makam Pahlawan yang di kelola	%	100		

**B. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>JUMLAH ANGGARAN (Rp.)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1. Program Pemberdayaan Sosial</b>		<b>278.000.000,00</b>
<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>278.000.000,00</b>
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	78.000.000,00
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000.000,00
<b>2. Program Rehabilitasi Sosial</b>		<b>2.053.219.405,00</b>
<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>		<b>411.208.405,00</b>
1	Penyediaan Permakanan	189.608.405,00
2	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	20.000.000,00
3	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	201.600.000,00
<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>		<b>1.642.011.000,00</b>
1	Pemberian Layanan Kedaruratan	41.775.000,00
2	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1.600.236.000,00
<b>3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>		<b>435.600.000,00</b>
<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>435.600.000,00</b>
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	396.000.000,00
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	39.600.000,00
<b>4. Program Penanganan Bencana</b>		<b>340.040.000,00</b>
<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>		<b>340.040.000,00</b>
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	340.040.000,00

<b>5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>		<b>25.500.000,00</b>
	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>25.500.000,00</b>
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	25.500.000,00
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>3.132.359.405,00</b>

PIHAK KEDUA,



**H. WAWAN KUSTAMAN, S.Pd., MM**  
NIP. 19670722 199307 1 001

Parigi, 04 Januari 2021

PIHAK PERTAMA

**Dra. DEWI SUNDARI, MM**  
NIP. 19651123 199312 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS SOSIAL,**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Jln. Raya Parigi No. 180 RT 03/RW 04 Parigi Telp./Fax. (0265) 2640972 Parigi 46393

---

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SUDARSO, SE  
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : TJOMI SURYADI, S.Sos., MM  
Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 04 Januari 2021

PIHAK KEDUA

  
**TJOMI SURYADI, S.Sos., MM**  
NIP. 19630806 199003 1 007

PIHAK PERTAMA

  
**SUDARSO, SE**  
NIP. 19640522 198603 1 011

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA DINSOSPMD 2021****PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN****A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA**

<b>No</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR / OUTCOME PROGRAM</b>	<b>OUTPUT KEGIATAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja pegawai	Bulan	12
			Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran	Bulan	12
			jumlah waktu penyediaan gedung kantor	Tahun	1
			Jumlah Penyelenggaraan Penunjang Layanan Perkantoran	Bulan	12
			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit	34

**B. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)
1	2	3
<b>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>703.792.907,00</b>
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>22.920.000,00</b>
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	22.920.000,00
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>207.140.000,00</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.340.000,00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	142.800.000,00
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>218.826.007,00</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.791,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.290.962,00
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.004.654,00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.295.600,00
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.200.000,00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.034.000,00

	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>150.000.000,00</b>
1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000,00
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>104.906.900,00</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.925.000,00
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.659.900,00
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.250.000,00
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.072.000,00
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>703.792.907,00</b>

Parigi, 04 Januari 2021

PIHAK KEDUA

  
**TJOMI SURYADI, S. Sos., MM**  
 NIP. 19630806 199003 1 007

PIHAK PERTAMA

  
**SUDARSO, SE**  
 NIP. 19640522 198603 1 011



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS SOSIAL,**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Jln. Raya Parigi No. 180 RT 03/RW 04 Parigi Telp./Fax. (0265) 2640972 Parigi 46393

---

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : CECEP ABDUL MUNAWAR, S.KPm

Jabatan : Kasubag Program dan Keuangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : TJOMI SURYADI, S.Sos., MM

Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 04 Januari 2021

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA

**TJOMI SURYADI, S.Sos., MM**  
NIP. 19630806 199003 1 007

**CECEP ABDUL MUNAWAR, S.KPm**  
NIP. 19871130 201503 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA 2021****PERJANJIAN KINERJA 2021  
DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN****A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR / OUTCOME PROGRAM</b>	<b>OUTPUT KEGIATAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	2
			Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan	Bulan	12
			Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	Bulan	12

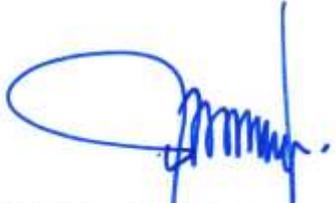
**B. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)
1	2	3
<b>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>3.136.600.932,00</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>46.800.000,00</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.800.000,00
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>3.062.800.932,00</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.949.400.932,00
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	113.400.000,00
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>27.000.000,00</b>
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.000.000,00
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>3.136.600.932,00</b>

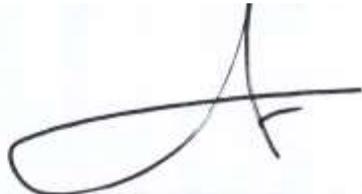
Parigi, 04 Januari 2021

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



**TJOMI SURYADI, S. Sos., MM**  
NIP. 19630806 199003 1 007



**CECEP ABDUL MUNAWAR, S.KPm**  
NIP. 19871130 201503 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS SOSIAL,**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Jln. Raya Parigi No. 180 RT 03/RW 04 Parigi Telp./Fax. (0265) 2640972 Parigi 46393

---

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RAYI PASYA, S.Sos.I  
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan dan Rehabilitasi Sosial  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dra. DEWI SUNDARI, MM  
Jabatan : Kabid Sosial  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 04 Januari 2021

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA

**Dra. DEWI SUNDARI, MM**  
NIP. 19651123 199312 2 001

**RAYI PASYA, S.Sos.I**  
NIP. 19810901 201503 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA DINSOSPMD 2021**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN**

**A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR / OUTCOME PROGRAM</b>	<b>OUTPUT KEGIATAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Presentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar yang dibina	Orang	470
			Jumlah Rehabilitasi Sosial PPKS yang dibina	KK	100

**B. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>JUMLAH ANGGARAN (Rp.)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1. Program Rehabilitasi Sosial</b>		<b>2.053.219.405,00</b>
	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>411.208.405,00</b>
1	Penyediaan Permakanan	189.608.405,00
2	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	20.000.000,00
3	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	201.600.000,00
	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>1.642.011.000,00</b>
1	Pemberian Layanan Kedaruratan	41.775.000,00
2	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1.600.236.000,00
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>2.053.219.405,00</b>

PIHAK KEDUA,



**Dra. DEWI SUNDARI, MM**  
NIP. 19651123 199312 2 001

Parigi, 04 Januari 2021

PIHAK PERTAMA



**RAYI PASYA, S.Sos.I**  
NIP. 19810901 201503 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS SOSIAL,**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Jln. Raya Parigi No. 180 RT 03/RW 04 Parigi Telp./Fax. (0265) 2640972 Parigi 46393

---

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DODOH MUNAWAROH  
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : TRISNADI KHOLIK, S.Pd. MM  
Jabatan : Kabid Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pemberdayaan Lembaga  
Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat

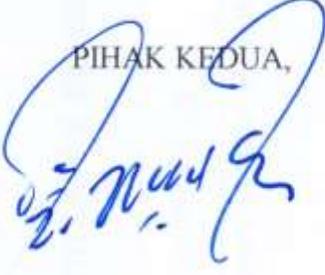
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 04 Januari 2021

PIHAK KEDUA,



**TRISNADI KHOLIK, S.Pd. MM**  
NIP. 19710221 199307 1 002

PIHAK PERTAMA



**DODOH MUNAWAROH**  
NIP. 19670607 198903 2 006

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA DINSOSPMD 2021**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN**

**A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA**

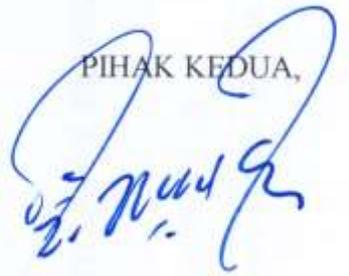
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR / OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya tata kelola dan kinerja pemerintahan desa yang efektif	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Lembaga	2

**B. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)
<b>1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b>		<b>49.637.750,00</b>
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>49.637.750,00</b>
1	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	15.000.000,00
2	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	34.637.750,00
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>49.637.750,00</b>

Parigi, 04 Januari 2021

PIHAK KEDUA,

  
**TRISNADI KHOLIK, S.Pd. MM**  
NIP. 19710221 199307 1 002

PIHAK PERTAMA

  
**DODOH MUNAWAROH**  
NIP. 19670607 198903 2 006



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS SOSIAL,**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Jln. Raya Parigi No. 180 RT 03/RW 04 Parigi Telp./Fax. (0265) 2640972 Parigi 46393

---

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ASEP DENI GINANJAR, S.Sos

Jabatan : Kepala Seksi Penataan Desa

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : YAYAT AHADIAT, SH.M.Si

Jabatan : Kabid Penataan, Kerjasama dan Adminitrasi Pemerintahan Desa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 04 Januari 2021

PIHAK KEDUA,

YAYAT AHADIAT, SH., M.Si  
NIP. 19700712 199803 1 010

PIHAK PERTAMA

ASEP DENI GINANJAR, S.Sos  
NIP. 19811025 201503 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA DINSOSPMD 2021**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN**

**A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR / OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya tata kelola dan kinerja pemerintahan desa yang efektif	Persentase Administrasi Desa yang baik dan tertib	Jumlah Desa yang bina dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Desa	93

**B. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)
1	2	3
<b>1. Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>		<b>169.800.000,00</b>
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>169.800.000,00</b>
1	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	70.000.000,00
2	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	19.800.000,00
3	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	30.000.000,00
4	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	50.000.000,00
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>169.800.000,00</b>

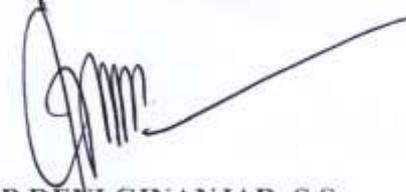
PIHAK KEDUA,



YAYAT AHADIAT, SH., M.Si  
NIP. 19700712 199803 1 010

Parigi, 04 Januari 2021

PIHAK PERTAMA



ASEP DENI GINANJAR, S.Sos  
NIP. 19811025 201503 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS SOSIAL,**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Jln. Raya Parigi No. 180 RT 03/RW 04 Parigi Telp./Fax. (0265) 2640972 Parigi 46393

---

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DADI KUSMAYADI, S.IP  
Jabatan : Kepala Seksi Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : YAYAT AHADIAT, SH.M.Si  
Jabatan : Kabid Penataan, Kerjasama dan Adminitrasi Pemerintahan Desa  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan surpervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 04 Januari 2021

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA

**YAYAT AHADIAT, SH., M.Si**  
NIP. 19700712 199803 1 010

**DADI KUSMAYADI, S.IP**  
NIP. 19630217 198907 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA DINSOPMD 2021**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN**

**A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR / OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya tata kelola dan kinerja pemerintahan desa yang efektif	Persentase Administrasi Desa yang baik dan tertib	Jumlah Desa yang bina dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Desa	93

**B. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)
1	2	3
<b>1. Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>		<b>49.800.000,00</b>
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>49.800.000,00</b>
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	30.000.000,00
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	19.800.000,00
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>49.800.000,00</b>

PIHAK KEDUA,



YAYAT AHADIAT, SH., M.Si  
NIP. 19700712 199803 1 010

Parigi, 04 Januari 2021

PIHAK PERTAMA



DADI KUSMAYADI, S.IP  
NIP. 19630217 198907 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS SOSIAL,**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Jln. Raya Parigi No. 180 RT 03/RW 04 Parigi Telp./Fax. (0265) 2640972 Parigi 46393

---

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : TRIYATNO  
Jabatan : Fungsional Umum Bendahara Pengeluaran  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : CECEP ABDUL MUNAWAR, S.KPm  
Jabatan : Kasubag Program dan Keuangan  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 04 Januari 2021

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA

**CECEP ABDUL MUNAWAR, S.KPm**  
NIP. 19871130 201503 1 001

**TRİYATNO**  
NIP. 19670402 200906 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA 2021****PERJANJIAN KINERJA 2021  
DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN****A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR / OUTCOME PROGRAM</b>	<b>OUTPUT KEGIATAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	2
			Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan	Bulan	12
			Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	Bulan	12

**B. PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)
1	2	3
<b>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>3.136.600.932,00</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>46.800.000,00</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.800.000,00
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>3.062.800.932,00</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.949.400.932,00
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	113.400.000,00
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>27.000.000,00</b>
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.000.000,00
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>3.136.600.932,00</b>

PIHAK KEDUA,

**CECEP ABDUL MUNAWAR, S.KPm**

NIP. 19871130 201503 1 001

Parigi, 04 Januari 2021

PIHAK PERTAMA

**TRİYATNO**

NIP. 19670402 200906 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS SOSIAL,**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Jln. Raya Parigi No. 180 RT 03/RW 04 Parigi Telp./Fax. (0265) 2640972 Parigi 46393

---

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : JAJANG SOMANTRI  
Jabatan : Fungsional Umum Bendahara Pengeluaran Pembantu  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : CECEP ABDUL MUNAWAR, S.KPm  
Jabatan : Kasubag Program dan Keuangan  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 04 Januari 2021

PIHAK KEDUA,

**CECEP ABDUL MUNAWAR, S.KPm**  
NIP. 19871130 201503 1 001

PIHAK PERTAMA

**JAJANG SOMANTRI**  
NIP. 19720624 201001 1 007

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA 2021****PERJANJIAN KINERJA 2021  
DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN****A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR / OUTCOME PROGRAM</b>	<b>OUTPUT KEGIATAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	2
			Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan	Bulan	12
			Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	Bulan	12

**B. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)
1	2	3
<b>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>3.136.600.932,00</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>46.800.000,00</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.800.000,00
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>3.062.800.932,00</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.949.400.932,00
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	113.400.000,00
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>27.000.000,00</b>
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.000.000,00
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>3.136.600.932,00</b>

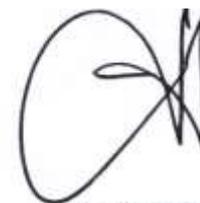
Parigi, 04 Januari 2021

PIHAK KEDUA,



**CECEP ABDUL MUNAWAR, S.KPm**  
NIP. 19871130 201503 1 001

PIHAK PERTAMA



**JAJANG SOMANTRI**  
NIP. 19720624 201001 1 007